

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Maksud utama dari penyusunan laporan ini adalah penggambaran kondisi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pengembangan konsep usaha yang dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana, melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendorong penguatan kolaborasi, adaptasi dan inovasi dengan target peningkatan kualitas Amenitas. Aksesibilitas dan Atraksi bidang kepariwisataan.

Harapan kami Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini menjadi media dalam membangun sinergitas serta komitmen bersama membangun Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat.

Kendari, Februari 2025

KEPALA DINAS,

BELLI, S.E., M.Si

NIP. 19800104 200803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Data Kepegawaian	3
1.4 Program dan Kegiatan	8
1.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran	12

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dan Hasil (outcome)	16
---	----

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	22
3.2 Saran	22

LAMPIRAN.

- Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata T.A 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara.....	4
Tabel 2	Komposisi dan Jumlah Personil	6
Tabel 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	6
Tabel 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	6
Tabel 5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Dalam Struktur	7
Tabel 6	Kabupaten/kota yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	19
Tabel 7	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	20
Tabel 8	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	20
Tabel 9	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi (realisasi investasi periode 2018-2023)	21
Tabel 10	Data Kumulatif Kinerja Satker Dispar Prov. Sulawesi Tenggara periode Januari s/d Desember 2023 Dana Tugas Pembantuan Satker Disbudpar Prov.Sultra Tahun Anggaran 2023.....	22
Tabel.11	Rekapitulasi Barang Ke Neraca per 31 Desember 2023.....	23
Tabel.12	Data Kumulatif Realisasi Satker Disbudpar Provinsi. Sulawesi Tenggara periode Januari-Desember 2023 Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker Disbudpar Prov. Sultra (640032) Tahun Anggaran 2023.....	24
Tabel.13	Indikator Pelaksanaan Anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara)	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang menciptakan pemerintahan yang bersih bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP Nomor 13 Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam PP Nomor 13 Tahun 2019, diatur bahwa kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
 - a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing- masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata merupakan salah satu OPD di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkewajiban untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Laporan ini selanjutnya digunakan oleh Gubernur sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan lebih lanjut, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sultra yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sultra Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov.Sultra berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian kembali mengalami reorganisasi

kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Dinas Pariwisata Prov.Sultra sebagai unsur pelaksana urusan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kewenangan Dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perkembangan pariwisata mampu memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan didorong oleh pemerintah dengan konsisten bahwa pariwisata dapat menjadi sektor unggulan menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan daerah. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan merupakan bagian penting dari indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Penguatan juga diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2020-2024, dijelaskan bahwa visi Indonesia menekankan Pembangunan Berkelanjutan menekankan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata.

Hal tersebut bersinergi dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang memiliki visi pembangunan sulawesi tenggara periode pemerintahan tahun 2018 – 2023 yaitu : “*Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat*”. Dan untuk menjabarkan atau mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 misi atau agenda utama pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
3. Mewujudkan birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village govenance) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemeritahan.

Dengan terwujudnya keempat hal tersebut mampu meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sosial ekonomi.

1.3 Data Kepegawaian

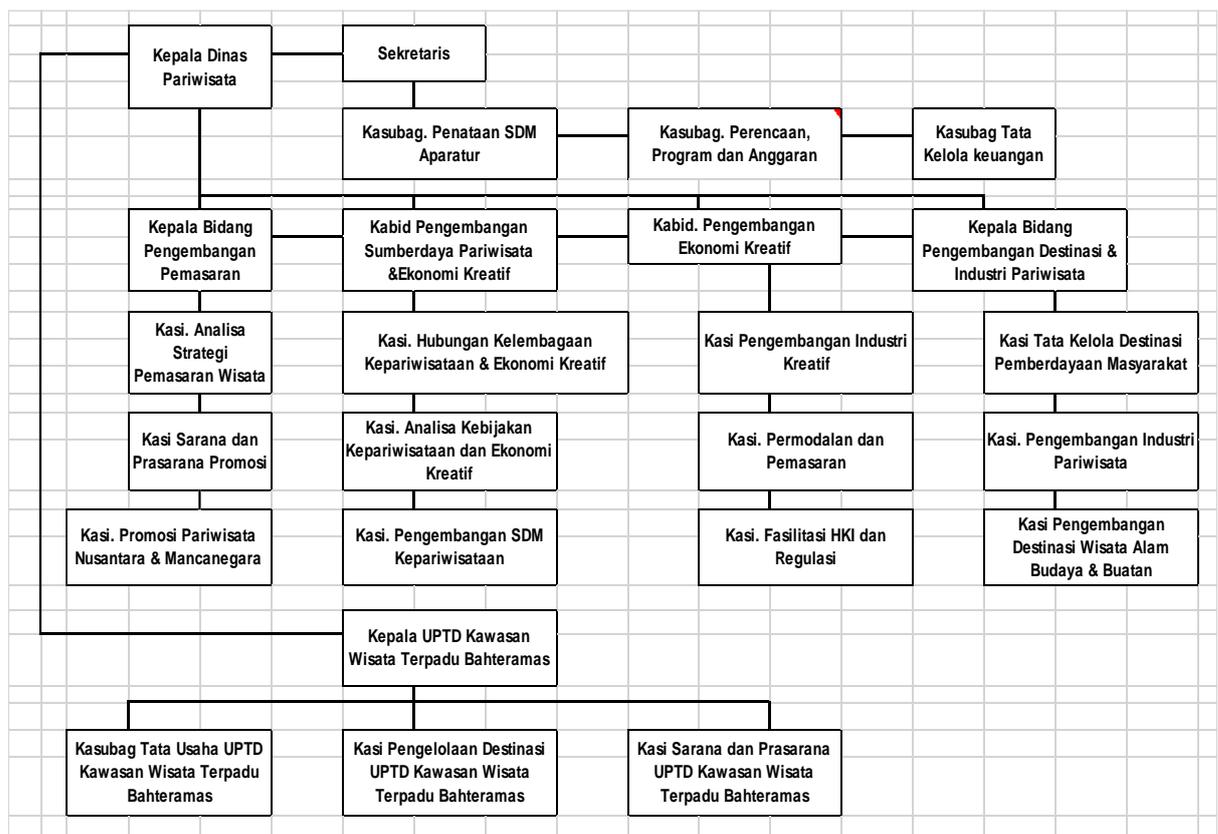
a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagaimana pada Peraturan Daerah Nomor : 73 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

- a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang Pariwisata;
- c. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata;
 - 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pariwisata;
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pariwisata Skala Nasional dan Internasional;

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pariwisata .
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pariwisata.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

- 2) **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Pemasaran. Fungsi bidang Pemasaran adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata;
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang pemasaran pariwisata.

- 3) **Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata**, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

- 4) **Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata. Dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya pariwisata;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumberdaya pariwisata; dan
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sumberdaya pariwisata.

- 5) **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis dibidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Budaya, Media, Desain dan Iptek (SBMDI), serta pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
 - b. Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI; dan
 - d. Pemberian bimbingan teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI.
- 6) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Destinasi Wilayah Kawasan Terpadu Bahteramas**, mempunyai tugas operasional dan pelaksanaan urusan administrasi teknis pelayanan wilayah destinasi wisata milik/aset Pemerintah Provinsi, meliputi 4 wilayah yaitu Pulau Bokori, Watersport Center, Pantai Batugong/Watumeleo dan Pantai Taipa.

b. Kondisi Pegawai, Sarana / Prasarana

1. Kondisi Pegawai

Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 90 pegawai dan Tenaga tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 20 orang. Menurut pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2
Komposisi dan Jumlah Personil

No.	Uraian	Jumlah
a	b	c
1.	Pegawai Negeri Sipil	76 Orang
2.	P3K/Honoror	26 Orang
Jumlah		102 Orang

Sumber : Dinas Pariwisata Prov.Sultra, 2024

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra sampai dengan tahun 2022 terdata sebagai berikut :

Tabel. 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	Fungsional	
a	b	c	d	e	f	g	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang/UPTD	-	-	-	5	-	5
4.	Staf/pelaksana	-	8	49	8	4	69
Jumlah							76

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Sultra, 2024

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Sultra, 2024

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JML
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
a	b	c	d	e	g	h	j	k	l	m
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	Staf/Pelaksana	-	13	45	1	-	11	-	-	70
6.	Tenaga Kontrak	-	-	5	-	-	21	-	-	26
TOTAL		-	19	0	1	-	11	-	1	102
% Terhadap Jumlah Pegawai										

Tabel. 5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Dalam Struktur

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	25
3.	Bidang Pengemb.Destinasasi & Industri Pariwisata	11
4.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	8
5.	Bidang Pengembangan Pemasaran	9
6.	Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10
7.	UPTD	12
Jumlah		76

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Sultra, 2024

1. 4 Program dan kegiatan

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pemindahan Tugas ASN
 - h) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - i) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Penyediaan Bahan/Material
 - h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Alat Besar
 - d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e) Pengadaan Mebel
 - f) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - h) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - i) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA

- 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - a) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 - b) Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 - c) Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

- d) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a) Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - b) Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - c) Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - d) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - f) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - g) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - d) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - e) Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

c. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - c) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

d. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - b) Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - c) Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik

- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
 - e) Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
 - f) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a) Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
 - b) Fasilitasi Kekayaan Intelektual
 3. Hak Kekayaan Intelektual

Mensosialisasikan dan memfasilitasi masyarakat ekonomi kreatif kepada Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

e. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - a) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - b) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - c) Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
 - d) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - e) Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)
 - f) Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)
 - g) Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
 - h) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - i) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - j) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. 5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi fisik	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	6 = (4+5)	7	8 = (3-6)
5	BELANJA DAERAH	31.530.453.439	30.382.781.734	96,36%	1.147.671.705
5.1	BELANJA OPERASI	28.076.671.534	27.071.338.673	96,42%	1.005.332.861
5.1.01	Belanja Pegawai	8.829.153.189	8.388.946.730	95,01%	440.206.459
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.247.518.345	18.682.391.943	97,06%	565.126.402
5.2	BELANJA MODAL	3.453.781.905	3.311.443.061	95,88%	142.338.844
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.383.460.000	1.344.741.500	97,20%	38.718.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.628.245	1.148.140.055	94,45%	67.488.190
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	774.693.660	738.641.506	95,35%	36.052.154
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000	79.920.000	99,90%	80.000
3.26	DINAS PARIWISATA	31.530.453.439	30.382.781.734	96,36%	1.147.671.705
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.751.295.411	13.006.983.787	94,59%	744.311.624
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.725.700	303.073.120	98,81%	3.652.580
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.902.800	103.659.250	97,88%	2.243.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.100.000	2.790.000	90,00%	310.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.599.800	1.499.250	57,67%	1.100.550
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.150.000	2.620.000	83,17%	530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.803.000	85.500.000	99,65%	303.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000	11.250.000	100,00%	-
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	178.732.900	177.582.020	99,36%	1.150.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.325.000	2.255.000	96,99%	70.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.613.900	2.613.400	99,98%	500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000	4.150.000	98,81%	50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.944.000	163.913.620	99,38%	1.030.380
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.650.000	4.650.000	100,00%	-
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	22.090.000	21.831.850	98,83%	258.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000	555.000	99,11%	5.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	536.000	524.950	97,94%	11.050
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	630.000	600.000	95,24%	30.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.264.000	18.051.900	98,84%	212.100
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	2.100.000	100,00%	-
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.811.814.536	8.370.087.880	94,99%	441.726.656
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.592.153.189	8.151.946.730	94,88%	440.206.459
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.434.677.800	4.267.061.200	96,22%	167.616.600
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	253.728.000	230.659.200	90,91%	23.068.800
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	445.765.600	404.169.532	90,67%	41.596.068
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	35.524.800	23.065.920	64,93%	12.458.880
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	287.420.000	235.440.000	81,91%	51.980.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	170.940.000	156.605.000	91,61%	14.335.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.320.000	13.320.000	100,00%	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	247.386.720	231.526.740	93,59%	15.859.980
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.856.960	13.904.640	66,67%	6.952.320
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.259.800	3.598.155	57,48%	2.661.645
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.376.500	-	0,00%	5.376.500

5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	252.780	57.272	22,66%	195.508
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.121.240	3.530	0,31%	1.117.710
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.648.127.996	2.551.140.559	96,34%	96.987.437
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.394.993	21.394.982	100,00%	11
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.000.000	207.000.000	100,00%	-
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	190.680.000	190.680.000	100,00%	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000	16.320.000	100,00%	-
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.661.347	11.141.150	87,99%	1.520.197
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000	320.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	799.347	799.150	99,98%	197
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	420.000	400.000	95,24%	20.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000	490.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.132.000	9.132.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	-	0,00%	1.500.000
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.598.750	58.700.000	96,87%	1.898.750
3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	60.598.750	58.700.000	96,87%	1.898.750
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000	30.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	-	0,00%	160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	627.500	-	0,00%	627.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	131.250	-	0,00%	131.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000	-	0,00%	980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.200.000	27.200.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	-
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.712.000	13.688.252	53,24%	12.023.748
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.847.000	10.508.252	48,10%	11.338.748
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	-	0,00%	160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	195.000	-	0,00%	195.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	315.000	-	0,00%	315.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	735.000	720.000	97,96%	15.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.942.000	8.288.252	43,76%	10.653.748
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	-
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-
3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.865.000	3.180.000	82,28%	685.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	-	0,00%	160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	195.000	-	0,00%	195.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	315.000	-	0,00%	315.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	945.000	930.000	98,41%	15.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	2.250.000	100,00%	-
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.184.825	1.398.489.181	99,45%	7.695.644
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.179.600	14.177.801	93,40%	1.001.799
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.179.600	14.177.801	93,40%	1.001.799
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.075.616	318.610.821	99,23%	2.464.795
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.904.016	9.774.200	98,69%	129.816
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	950.000	950.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.986.600	16.830.121	99,08%	156.479
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor				
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.160.000	27.100.000	99,78%	60.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	170.000.000	168.291.500	99,00%	1.708.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	76.650.000	76.590.000	99,92%	60.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.000.000	6.800.000	97,14%	200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.000.000	11.850.000	98,75%	150.000
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.310.000	11.270.000	91,55%	1.040.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.625.000	1.625.000	100,00%	-

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.035.000	4.335.000	86,10%	700.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00%	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	300.000	-	0,00%	300.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.350.000	1.310.000	97,04%	40.000
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.703.882	44.635.999	99,85%	67.883
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.966.382	30.965.999	100,00%	383
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000	2.800.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.937.500	10.870.000	99,38%	67.500
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.120.797	72.239.640	97,46%	1.881.157
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	74.120.797	72.239.640	97,46%	1.881.157
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.200.000	9.120.000	89,41%	1.080.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.200.000	9.120.000	89,41%	1.080.000
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.344.930	93.291.200	99,94%	53.730
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	23.144.930	23.091.200	99,77%	53.730
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	70.200.000	70.200.000	100,00%	-
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	835.250.000	835.143.720	99,99%	106.280
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	827.000.000	826.893.720	99,99%	106.280
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000	8.250.000	100,00%	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	-	-	-	-
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.313.674.300	1.267.179.805	96,46%	46.494.495
3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985.000.000	949.200.000	96,37%	35.800.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	985.000.000	949.200.000	96,37%	35.800.000
3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.250.000	209.955.505	95,33%	10.294.495
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	220.250.000	209.955.505	95,33%	10.294.495
3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	108.424.300	108.024.300	99,63%	400.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.000.000	99.600.000	99,60%	400.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	8.424.300	8.424.300	100,00%	-
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.335.000	669.186.964	94,88%	36.148.036
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.450.000	81,67%	550.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	2.450.000	81,67%	550.000
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.180.000	306.736.964	89,64%	35.443.036
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	75.000.000	75.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	90.240.000	75.431.000	83,59%	14.809.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	135.000.000	116.288.144	86,14%	18.711.856
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	41.940.000	40.017.820	95,42%	1.922.180
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.155.000	360.000.000	99,96%	155.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155.000	-	0,00%	155.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	324.000.000	324.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000	36.000.000	100,00%	-
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.121.250.300	926.578.585	82,64%	194.671.715
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	218.612.900	212.300.418	97,11%	6.312.482
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	134.012.900	134.012.900	100,00%	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.800.000	14.290.747	85,06%	2.509.253
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000	49.918.765	99,84%	81.235
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000	13.843.006	79,10%	3.656.994
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	300.000	235.000	78,33%	65.000
3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.770.000	44.724.000	99,90%	46.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	7.190.000	7.190.000	100,00%	-

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.960.000	21.960.000	100,00%	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000	7.999.000	99,61%	31.000
3.26.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64.000.000	60.146.535	93,98%	3.853.465
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat	40.000.000	39.945.535	99,86%	54.465
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	783.867.400	599.407.632	76,47%	184.459.768
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	67.470.000	67.440.000	99,96%	30.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	501.831.000	322.845.282	64,33%	178.985.718
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	209.973.950	209.122.350	99,59%	851.600
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.592.450	-	0,00%	4.592.450
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.235.153.230	5.062.087.751	96,69%	173.065.479
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	500.000.000	494.505.000	98,90%	5.495.000
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	500.000.000	494.505.000	98,90%	5.495.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi	500.000.000	494.505.000	98,90%	5.495.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4.259.702.730	4.107.046.338	96,42%	152.656.392
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.100.000.000	2.090.440.800	99,54%	9.559.200
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	800.000.000	799.344.300	99,92%	655.700
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi	1.300.000.000	1.291.096.500	99,32%	8.903.500
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	1.885.007.730	1.793.623.406	95,15%	91.384.324
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.046.250	200.000	19,12%	846.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.095.280	125.000	11,41%	970.280
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	299.999.995	299.700.000	99,90%	299.995
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.500.000	44.034.000	96,78%	1.466.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	242.600.525	232.963.050	96,03%	9.637.475
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	511.697.020	469.584.850	91,77%	42.112.170
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	8.375.000	8.375.000	100,00%	-
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	27.142.750	27.142.750	100,00%	-
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	313.030.010	298.141.076	95,24%	14.888.934
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	217.520.900	206.724.330	95,04%	10.796.570
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	217.000.000	206.633.350	95,22%	10.366.650
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	71.829.000	61.423.432	85,51%	10.405.568
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.010.000	-	0,00%	1.010.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.185.000	-	0,00%	2.185.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000	5.920.000	89,70%	680.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	-	-		-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.034.000	55.503.432	89,47%	6.530.568
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	89.370.000	49.412.200	55,29%	39.957.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.935.000	3.280.000	66,46%	1.655.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.005.000	1.065.200	53,13%	939.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-		-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-		-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.130.000	12.867.000	67,26%	6.263.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	15.800.000	15.800.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-		-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	1.500.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000	14.900.000	32,39%	31.100.000
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	113.496.000	112.146.500	98,81%	1.349.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	-	0,00%	160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000	-	0,00%	190.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000	-	0,00%	210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000	-	0,00%	490.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.246.000	110.946.500	99,73%	299.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.200.000	100,00%	-
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	475.450.500	460.536.413	96,86%	14.914.087
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	475.450.500	460.536.413	96,86%	14.914.087
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	562.500	500.000	88,89%	62.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.916.000	2.026.000	69,48%	890.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.000.000	5.400.000	77,14%	1.600.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.810.000	8.810.000	100,00%	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan				
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	200.000.000	199.877.700	99,94%	122.300
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	175.000.000	174.691.800	99,82%	308.200
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.433.000	3.300.000	96,13%	133.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.079.000	47.081.914	81,07%	10.997.086
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.828.742.600	8.770.211.055	99,34%	58.531.545
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	8.828.742.600	8.770.211.055	99,34%	58.531.545
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	5.715.000.000	5.708.401.260	99,88%	6.598.740
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	#DIV/0!	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	100.000.000	99.955.500	99,96%	44.500
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	25.000.000	25.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	400.000.000	399.733.200	99,93%	266.800
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.175.000.000	5.169.984.560	99,90%	5.015.440
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000	13.728.000	91,52%	1.272.000
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	29.650.000	29.173.950	98,39%	476.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	160.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000	189.950	99,97%	50
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000	200.000	95,24%	10.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000	490.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.600.000	28.134.000	98,37%	466.000
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.084.092.600	3.032.635.845	98,33%	51.456.755
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.667.000	3.647.000	99,45%	20.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.735.100	1.709.400	62,50%	1.025.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.987.500	4.920.000	98,65%	67.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000	2.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.000.000	13.250.000	53,00%	11.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.714.000	5.474.000	70,96%	2.240.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-		-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	24.000.000	15.000.000	62,50%	9.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.939.047.000	2.917.973.250	99,28%	21.073.750
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-		-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.942.000	68.662.195	91,62%	6.279.805
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-		-
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.550.822.698	2.474.376.821	97,00%	76.445.877
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2.134.921.700	2.095.819.302	98,17%	39.102.398
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan	67.693.500	63.968.202	94,50%	3.725.298
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	411.000	411.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	485.000	485.000	100,00%	-

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	787.500	775.000	98,41%	12.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	480.000	68,57%	220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.310.000	61.817.202	94,65%	3.492.798
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar	2.067.228.200	2.031.851.100	98,29%	35.377.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.609.000	2.146.000	82,25%	463.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.031.700	577.350	19,04%	2.454.350
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.100.000	1.550.000	73,81%	550.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	226.500.000	223.950.000	98,87%	2.550.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	100.000.000	96.237.000	96,24%	3.763.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.048.000	6.200.000	38,63%	9.848.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	3.000.000	-	0,00%	3.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.664.224.500	1.651.488.000	99,23%	12.736.500
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	40.000.000	39.987.750	99,97%	12.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.715.000	9.715.000	100,00%	-
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	415.900.998	378.557.519	91,02%	37.343.479
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	28.850.000	24.564.950	85,15%	4.285.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	160.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000	189.950	99,97%	50
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000	200.000	95,24%	10.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000	400.000	81,63%	90.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.800.000	23.615.000	84,95%	4.185.000
3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-	-	-	-
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi	-	-	-	-
3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	24.999.850	21.896.153	87,59%	3.103.697
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.000	290.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	68.600	-	0,00%	68.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	131.250	-	0,00%	131.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000	11.800.000	80,27%	2.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.810.000	9.806.153	99,96%	3.847
3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	362.051.148	332.096.416	91,73%	29.954.732
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.750.000	13.750.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.148	1.447.000	97,96%	30.148
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.293.000	6.292.998	100,00%	2
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.050.000	1.000.000	95,24%	50.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.400.000	17.400.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	13.750.000	13.750.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.980.000	97.350.000	99,36%	630.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	33.800.000	33.800.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000	6.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	65.000.000	52.499.998	80,77%	12.500.002
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.351.000	88.606.420	84,11%	16.744.580
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.164.439.500	1.069.122.320	91,81%	95.317.180
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.164.439.500	1.069.122.320	91,81%	95.317.180
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan	339.277.450	290.499.999	85,62%	48.777.451
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.000.000	11.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.971.100	1.715.000	87,01%	256.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.402.100	7.400.000	99,97%	2.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	350.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.181.250	375.000	31,75%	806.250

5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.000.000	16.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.000.000	8.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	24.000.000	24.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.600.000	80.038.000	99,30%	562.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan				
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8.000.000	8.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.000.000	16.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.500.000	4.999.999	40,00%	7.500.001
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.073.000	82.422.000	67,52%	39.651.000
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	255.878.750	249.431.240	97,48%	6.447.510
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	991.200	988.000	99,68%	3.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.929.800	3.929.000	99,98%	800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	708.750	705.000	99,47%	3.750
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.000.000	8.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.000.000	4.000.000	66,67%	2.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.510.000	55.958.240	99,02%	551.760
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan				
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.000.000	4.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.000.000	8.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6.000.000	6.000.000	100,00%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.839.000	35.931.000	92,51%	2.908.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.600.000	15.600.000	100,00%	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	80.000.000	79.920.000	99,90%	80.000
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	551.864.300	515.515.081	93,41%	36.349.219
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.000.000	11.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.312.900	1.083.000	82,49%	229.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.518.400	10.341.001	98,31%	177.399
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000	600.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.050.000	864.000	82,29%	186.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.000.000	24.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.000.000	12.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.550.000	166.996.840	99,08%	1.553.160
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	45.300.000	44.400.000	98,01%	900.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000	12.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000	24.000.000	100,00%	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	22.500.000	15.000.000	66,67%	7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.233.000	110.820.240	81,35%	25.412.760
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.600.000	15.210.000	97,50%	390.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.200.000	31.200.000	100,00%	-
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	17.419.000	13.676.000	78,51%	3.743.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000	-	0,00%	160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000	-	0,00%	190.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000	-	0,00%	210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000	-	0,00%	1.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.899.000	13.676.000	91,79%	1.223.000
JUMLAH		31.530.453.439	29.523.759.519	93,64%	2.006.693.920

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) Dan Hasil (Outcome).

Menunjuk kepada Peraturan Pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010 - 2025, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang multidimensi dan multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap manusia tentang interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pengusaha.

Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang memberikan dampak jangka Panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan. Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism, Dunia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki empat pilar fokus yang dikembangkan yaitu pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang, keberlanjutan budaya (sustainable culture) yang harus selalu dikembangkan serta aspek lingkungan (environment sustainability). Berbekal 4 pilar utama tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang banyak diminati wisatawan yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam.

Konsep sustainable tourism merupakan dasar pengembangan dari Taman Nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata berbasis sustainable tourism yang masih terus bertahan hingga sekarang. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan pariwisata.

Dinas Pariwisata melalui Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mengidentifikasi Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya penghasil devisa negara disamping sektor migas. Dunia pariwisata memiliki potensi yang sangat besar.

Di beberapa negara, pariwisata agritourism bertumbuh sangat pesat. Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Meski demikian, banyak dari potensi tersebut yang masih belum dikenal oleh masyarakat luas atau belum terekspose secara optimal. Baik karena kurangnya aksesibilitas ke daerah tersebut, minimnya investasi dari pemerintah dan swasta, maupun masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya alam. Berbagai jenis sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara seperti hutan, perairan, dan mineral, masih sangat banyak yang belum tergarap secara maksimal. Dinas Pariwisata

melaksanakan pengembangan Sustainable Tourism pada Kawasan Keraton di wilayah Sulawesi Tenggara dengan tujuan tersusun analisis mengenai kondisi teknis, ekonomi dan keuangan kawasan pariwisata di Kawasan tersebut, adanya kajian terhadap kondisi lingkungan, sosial dan hukum terkait, dan didapatnya rekomendasi sebagai hasil dari analisis kelayakan sehingga sasaran dapat tercapai yaitu tersajinya data dan informasi objek wisata Kawasan Keraton di wilayah Sulawesi Tenggara yang lengkap, Teridentifikasinya potensi objek wisata, potensi masyarakat dan deliniasi di kawasan yang lengkap, Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan objek wisata, Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar kawasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam Kawasan dan Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta.

Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif telah mengidentifikasi bahwa Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi di bidang industri kreatif, sering muncul konten-konten kreatif dalam bentuk karya di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi.

Atas dasar potensi tersebut diatas, pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis dan rahasia dagang. Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide untuk para pelaku industri kreatif.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide. Kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasianya.

Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus dan melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung kreativitas pelaku ekraf, seperti dengan program Apresiasi Kreasi Indonesia dan Food Startup serta beberapa program lainnya dengan organisasi lokal dan pemerintah pusat, dengan target kemudahan

ini diharapkan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan produk, merek, atau ide untuk mendapatkan perlindungan dari HKI.

Dinas Pariwisata melalui Bidang Pemasaran telah mengembangkan program pemasaran pariwisata dengan konsep yang selaras dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), yaitu konsep pembangunan pariwisata yang memperhitungkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan alam.

Pemasaran adalah suatu aktivitas, baik aktivitas yang dilakukan oleh organisasi maupun oleh individu yang dioperasikan melalui institusi atau lembaga baik yang berorientasi laba maupun nirlaba serta proses-proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan (pelanggan akhir maupun pelanggan bisnis atau perantara) dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung-jawab terhadap masyarakat secara luas. Dapat disimpulkan fungsi pemasaran adalah bertujuan untuk melakukan pertukaran/transaksi di lapangan. Pemasaran pariwisata berkelanjutan adalah memilih pasar sasaran. Pasar disini bukan hanya pelanggan saja, tetapi di dalamnya termasuk arena (*marketplace*), pesaing (*competitors*) dan atau rekanan (*partners*) sehingga selalu dekat dengan pelanggan (*customer intimacy*) dan memperlakukan pelanggan seperti sahabat (*customer engagement*) sehingga destinasi akan selalu tahu apa yang ada di benak pelanggannya (*customer insight*), baik itu pelanggan akhir (*pengunjung*) maupun pelanggan internal atau para pemangku kepentingan pariwisata yang ada di destinasi pariwisata.

Dalam perihal Koordinator hubungan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif berprinsip bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan Kepariwisata & Ekraf merupakan kunci utama kemajuan dalam pengembangan Kepariwisata, bahwa kapasitas SDM dan Kelembagaan Kepariwisata & Ekraf saat ini bukan hanya dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, namun di saat yang bersamaan harus mampu mempertahankan orisinalitas kebudayaan daerah dan keasrian lingkungannya.

Disebabkan oleh hal tersebut, sinergi, kolaborasi, inisiatif, dan kemampuan untuk belajar dan berbagi ilmu menjadi penting untuk dimiliki oleh masyarakat terutama para penggerak pariwisata daerah. Hal yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di industri pariwisata adalah mengenai pendalaman pemahaman, kepekaan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola industri pariwisata. Dalam sertifikasi profesi kompetensi tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Peningkatan kerjasama dengan organisasi Pariwisata telah melalui proses pengembangan. Kerjasama telah dilaksanakan dengan wadah berjejaring seperti dengan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI),

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan dengan beberapa perhimpunan pariwisata lainnya. Khususnya dengan Asidewi atau dengan kelembagaan desa wisata selanjutnya, mulai tahun lalu di intensifkan karena pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata menjadi hal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Urusan Pemerintahan :

Pariwisata

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) :

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	131 fasilitas pariwisata	Dinas Pariwisata	Aset Daerah
2	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi (realisasi investasi periode 2018-2024)	22.975.461.225 (Rp)	Dinas Pariwisata	Aset Daerah
4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	fasilitas pariwisata 22.975.461.225 (Rp)	Dinas Pariwisata	Aset Daerah
5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi Jenis usaha merujuk pada jenis usaha yang disebutkan pada indikator output nomor 4	Pergub No. 60 thn 2015 ttg Perubahan kedua atas Pergub Sultra No. 72 thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Dilingkungan Pemprov. Sultra.	Dinas Pariwisata	
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1.41	BPS Prov. Sulawesi Tenggara	

7	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1.14	BPS Prov. Sulawesi Tenggara	
8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3617	Dinas Pariwisata	
9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	12.946.373	Direktori Statistik Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia	
10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri, bisa sebagai peserta atau penyelenggara	5 promosi event daerah <ul style="list-style-type: none"> • Event Halo Sutra 2024 • Festival Wowine Wance • Berova Fun Run • Festival Desa Wisata Sulawesi Tenggara • Launching Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 	Dinas Pariwisata (Bidang Pengembangan Pemasaran)	
11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	-	-	
12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Wisata Labengki Kecil • Desa Wisata Namu • Desa Wisata Wasuemba • Desa Wisata Waburi • Desa Wisata Liangkobori • Desa Wisata Sumber Sari 	Dinas Pariwisata	
13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<p>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi = 26 Orang</p> <p>----- x100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja pariwisata = 30 Orang</p>	86 % Sertifikasi Kompetensi Asesor Pariwisata	Dinas Pariwisata (Satker Disbudpar)	APBN

14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	Dinas Pariwisata (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	
		200			
		----- x100%			
		200			
		Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan			
15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	9 Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Muna • Kab. Muna Barat • Kab. Buton • Kab. Buton Selatan • Kab, Buton Tengah • Kab. Kolaka • Kab. Kolaka Utara • Kab. Kolaka Timur • Kota Baubau 	Dinas Pariwisata	

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Urusan Pemerintahan : Pariwisata

NO	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ Jumlah wisman tahun n = 3.617 Jumlah wisman tahun n-1 = 2.154	67 %	Dinas Pariwisata	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisnus tahun n} - \text{Jumlah wisnus tahun n-1}}{\text{Jumlah wisnus tahun n-1}} \times 100\%$ Jumlah wisnus tahun n = 12.946.373 Jumlah wisnus tahun n-1 = 12.804.460	11 %	Data Statistik Wisatawan Mancanegara Kmenparekraf / Baparekraf	
3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ Jumlah kamar yang terjual = 4,740 Jumlah kamar yang tersedia = 9.619	49,51%	Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Tenggara	
4	Kontribusi sektor	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	0,50 %	Badan Pusat	

pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	----- x100%	Statistik Prov. Sulawesi Tenggara	
	Total PDRB harga berlaku		
	950.000.000.000		
	----- x100%		
	189.480.000.000.000		

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bagian yang penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah di jalankan selama satu tahun anggaran kepada Gubernur. Laporan ini juga sangat bermanfaat terutama dalam mengukur kinerja dan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dan hal ini merupakan tanggungjawab secara moril dan material terhadap seluruh rangkaian program/kegiatan instansi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 yang berpedoman pada RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA.

1.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Sektor pariwisata yang berkembang dengan baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan pajak dan pendapatan daerah, serta memberikan dukungan bagi sektor lain secara ekonomi. Dalam perkembangannya sektor pariwisata menghadapi masalah antara lain adalah :

1. Kabupaten dan Kota yang belum melaksanakan revisi pengembangan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) di masing-masing wilayah.
2. Pelaku Industri Pariwisata belum memiliki interaksi dengan seluruh komponen pariwisata.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dimanfaatkan untuk promosi dan layanan pariwisata.
4. Memaksimalkan Investasi Industri Pariwisata.
5. Mengembangkan kepariwisataan yang memiliki keterkaitan aspek lingkungan hidup.
6. Keseimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dan sektor pertambangan.

b. Solusi :

Dinas Pariwisata Provinsi melalui Program Seven Wonder Kepariwisata Sulawesi Tenggara menjadikan Kabupaten Wakatobi sebagai sentra yang akan disangga oleh tujuh zona wisata yang memiliki daya tarik dan telah diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur

Sulawesi Tenggara Nomor 310 Tahun 2022. Destinasi wisata penyangga tersebut sebagai Seven Wonder (tujuh keajaiban) adalah sebagai berikut :

1. Koridor Wisata Teluk Kendari-Toronipa-Labengki
2. Benteng Keraton Wolio-Lambusango
3. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
4. Pulau Padamarang
5. Kawasan Karts Pulau Muna
6. Kawasan Karts Matarombeo
7. Kawasan Mangrove Buton Utara

Program Seven Wonder Kepariwisataaan Sulawesi Tenggara akan menunjuk kepada skala program prioritas pengembangan kepariwisataan, karena keragaman daya tarik wisata alam dan budaya di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup banyak. Dalam data kepemilikan terdapat 200 pantai, 200 spot dive, 100 air terjun, 100 benteng, 100 cave dive, dan lebih dari 100 desa wisata. Dalam mendukung program tersebut, Dinas Pariwisata melaksanakan penguatan konsep dalam kegiatan. Berikut adalah pola pengembangan :

- a. Pengembangan potensi wisata desa sehingga menjadi desa wisata
- b. Peningkatan SDM pariwisata berupa pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi SDM industri, dan masyarakat
- c. Peningkatan infrastruktur fasilitas pariwisata.
- d. Membuka peluang investasi sektor pariwisata.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif.

Pengembangan sektor Pariwisata Sulawesi Tenggara membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat. Dinas Pariwisata dalam lima tahun terakhir secara aktif langsung melakukan sinergitas kepada Masyarakat, khususnya masyarakat desa melalui pemerintah desa dan pemerintah kab/kota melalui Program Pengembangan Desa Wisata.

Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata dibentuk sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku pariwisata dengan memaksimalkan potensi di wilayah masing-masing desa, dengan keterlibatan dari semua unsur desa. Mulai dari petinggi, kepala desa, perangkat desa, sampai struktural RT dan warga masyarakat setempat memiliki andil di dalamnya. Dinas Pariwisata melaksanakan pengembangan program dalam konteks desa wisata menyangkut semua komponen yang ada maupun dimiliki suatu desa untuk selanjutnya bisa dijual, dikemas, serta disajikan untuk menjadi satu paket wisata.

Pengembangan program desa wisata menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan dari semua unsur desa. Jika belum terpenuhi maka Dinas Pariwisata secara bertahap

melaksanakan pengembangan program wisata desa. Wisata desa adalah kegiatan wisata yang dilakukan pada obyek wisata desa. Maka, desa wisata adalah obyek dan wisata desa adalah kegiatannya. Keduanya adalah potensi besar yang dimiliki, dan sangat membutuhkan perancangan pengembangan dari semua unsur teknis Kabupaten dan Kota.

Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pendampingan program pengembangan pada desa-desa wisata berikut :

1. Desa Wisata Sani Sani, Kabupaten Kolaka.
2. Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara.
4. Desa Wisata Liangkobori, Kabupaten Muna.
5. Desa Wisata Bokori, Kabupaten Konawe.
6. Desa Wisata Tinukari, Kabupaten Kolaka Utara.
7. Desa Wisata Namu, Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel. 6
Kabupaten/kota yang memperoleh pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
1	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Konawe Selatan
2	Festival Gunung Jati	Kendari
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
3	Pelatihan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Film, Animasi dan Vidio	Kab. Wakatobi
4	Pelatihan kapasitas SDM Sektor Pariwisata Bidang Homestay	Kabupaten Buton Tengah
5	Workshop Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Kendari
6	Pelatihan Penyusunan dan Pemasaran Paket Wisata	Kota Kendari
7	Pelatihan Inovasi Produk Kreatif bagi Pelaku Usaha Suvenir Desa Wisata	Kota Baubau
8	Pelatihan Inovasi Kreasi Kriya Tingkat Lanjutan	Kabupaten Wakatobi

Tabel. 7
Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
12	Sultra Tenun Karnaval	Kota Kendari
Program Pemasaran Pariwisata		
14	Festival Desa Wisata Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton
15	HALO SULTRA 2024	Kota Kendari
16	Festival Wowine Wance	Kabupaten Wakatobi
17	Launching Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024	Kota Kendari
18	Berova Fun Run	Kabupaten Kolaka Utara

Tabel. 9

Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi (realisasi investasi periode 2018-2023)

No	Kab/Kota	Lokasi	Jenis Fasilitas	Nilai Pekerjaan (Rp)	Tahun Anggaran	Sumber Biaya
1	Kota Kendari	Watersport	Pembangunan Paving Blok	267.780.000	2018	DAK
2			Pembangunan Talud	1.915.900.000	2018	DAK
3			Pekerjaan Konstruksi Penataan Lansekap Water Sport Teluk Kendari.	538.890.000	2019	DAK
4			Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagur Watersport Teluk Kendari	150.990.000	2019	APBD
5			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Jaga Watersport Teluk Kendari	74.530.000	2019	APBD
6	Kab. Konawe	Desa Bokori	Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan	953.900.000	2018	DAK
7			Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan	1.118.000.000	2018	DAK
8			Pembangunan Talud	959.780.000	2018	
9			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bak Air Pulau Bokori.	49.770.000	2019	APBD
10			Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Gazebo Pulau Bokori	159.500.127	2019	APBD
11			Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Villa Percontohan Pulau Bokori.	179.444.000	2019	APBD
12			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kios Kuliner dan Cinderamata Pulau Bokori	489.630.000	2019	DAK
13			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Toilet Pulau Bokori	392.459.000	2019	DAK
14			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Internal Pulau Bokori,.	731.600.000	2019	DAK
15			Pekerjaan Konstruksi Penataan Lansekap Pulau Bokori.	979.130.000	2019	DAK
16			Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Kios Cinderamata Pulau Bokori	651.750.000	2020	DAK
17			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Pulau Bokori	260.000.000	2020	DAK
18			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Pulau Bokori	1.032.780.000	2020	DAK
19			Belanja Pembangunan Talud Pulau Bokori	1.383.946.000	2021	DAK
20			Penataan Lansekap Pulau Bokori	528.000.000	2021	DAK
21			Belanja Pengadaan Lampu Taman Pulau Bokori	264.863.000	2021	DAK
22	Kab. Konawe Utara	Pantai Tanjung Taipa	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Toilet Pantai Tanjung Taipa	381.515.000	2019	DAK
23			Pekerjaan Konstruksi Penataan Lansekap Pantai Tanjung Taipa	1.496.490.000	2019	DAK
24			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Internal Pantai Tanjung Taipa	474.770.000	2019	DAK
25			Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gazebo Pantai Tanjung Taipa	521.520.890	2020	DAK
26			Pekerjaan Konstruksi Penataan Lansekap Segmen 3 Pantai Tanjung Taipa	270.370.000	2020	DAK
27			Pekerjaan Konstruksi Penataan Lansekap Segmen 2 Pantai Tanjung Taipa	267.799.000	2020	DAK
28			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Pantai Tanjung Taipa	696.950.704	2020	DAK

29			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Menara Pandang Pantai Tanjung Taipa	281.800.000	2020	DAK
30			Belanja Pengadaan Lampu Taman Pantai Tanjung Taipa	248.141.000	2021	DAK
31			Penataan Lansekap Segmen 3 Pantai Tanjung Taipa	298.591.000	2021	DAK
32			Penataan Lansekap Segmen 1 Pantai Tanjung Taipa	573.725.000	2021	DAK
33			Belanja Pembangunan Tempat Parkir Pantai Tanjung Taipa	1.011.000.000	2021	DAK
34			Penataan Lansekap DTW Pantai Tanjung Taipa	199.916.000	2022	APBD
35	Kab. Konawe	Pantai Batu Gong	Penataan Area Parkir DTW Pantai Batu Gong	199.763.000	2022	APBD
36			Pembangunan Gazebo DTW Pantai Batu Gong	199.860.000	2022	APBD
37			Penataan Lansekap DTW Pantai Batu Gong	199.850.000	2022	APBD
38			Pembangunan Lampu Penerangan Kawasan DTW Pantai Batu Gong	159.850.000	2022	APBD
39			Pembangunan Menara Pandang DTW Pantai Batu Gong	199.718.000	2022	APBD
40			Pembangunan Sarana Air Bersih DTW Pantai Batu Gong	199.755.000	2022	APBD
41			Pembangunan Toilet/Ruang Ganti DTW Pantai Batu Gong	199.639.000	2022	APBD
42			Pembangunan Villa DTW Pantai Batu Gong	199.849.000	2022	APBD
43			Pembangunan Pagar DTW Batu Gong	167.500.000	2023	APBD
44			Penataan Area Parkir (Tahap II) DTW Batu Gong	199.792.500	2023	APBD
45			Penataan Pedestrian DTW Batu Gong	187.535.900	2023	APBD
46	Kab. Buton Utara	Pantai Malalanda	Pembangunan Gazebo Pantai Malalanda, Kab. Buton Utara	199.000.000	2023	APBD
47	Kab. Buton	Pantai Lahonduru	Belanja Pembangunan Gazebo Pantai Lahonduru, Kab. Buton	178.100.000	2023	APBD
48			Belanja Pembangunan Broadwalk Pantai Lahonduru, Kab. Buton	155.526.600	2023	APBD
49	Kab. Bombana	Pantai Waemputtang	Belanja Pembangunan Gazebo Pantai Waemputtang, Kab. Bombana	124.435.999	2023	APBD
	Kab. Kolaka Utara	Desa Wisata Larui	Belanja Pembangunan Fisik Penataan Fasilitas Wisata DTW Kabupaten Kolaka Utara	400.055.000	2024	APBD
Total Jumlah				22.975.460.720		

DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Dokumentasi
Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan
Intelektual





Koordinasi kegiatan workshop pengembangan ekonomi kreatif Berbasis kekayaan intelektual pada kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif.



Festival Gunung Jati



Workshop
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis Kekayaan
Intelektual
Kabupaten
Konawe Selatan





Dokumentasi
Program
Pemasaran
Pariwisata



Festival Desa Wisata
Sulawesi Tenggara
Kabupaten Buton



Berova Fun Run
Kabupaten Kolaka
Utara





HALO
SULTRA
2024

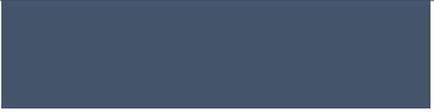


Launching
Kharisma
Event
Nusantara
(KEN)
2024



Festival Wowine Wance
Kabupaten Wakatobi



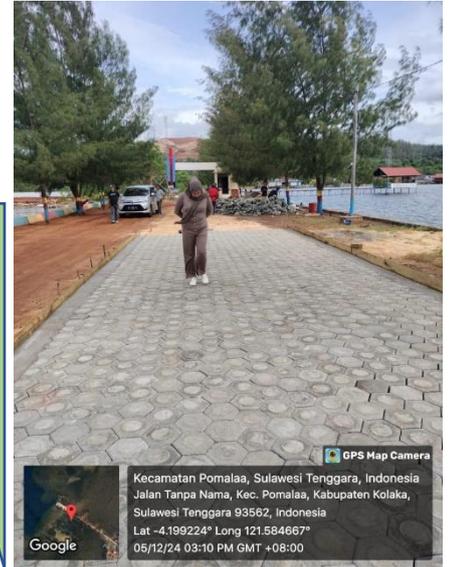


Dokumentasi
Program
Peningkatan
Daya Tarik
Destinasi
Pariwisata





Belanja Penataan Area Parkir
Destinasi Wisata Desa Tambea,
Kabupaten Kolaka



Belanja Penataan Area Parkir
(Tahap III) DTW Batu Gong





Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Destinasi Wisata



Bimbingan Teknis Penyusunan Investment Project Ready To Offer (IPRO) Sektor Pariwisata





Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Liangkabori



Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Destinasi Wisata Benteng Prov. Sulawesi Tenggara





Dokumentasi
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif



Pelatihan Kompetensi
SDM Ekonomi Kreatif
Sub Sektor Film,
Animasi dan Video



Pelatihan
Kapasitas SDM
Sektor Pariwisata
Bidang Homestay





Workshop
Peningkatan
Keterampilan
Pengelolaan Event
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif



Pelatihan
Penyusunan dan
Pemasaran Paket
Wisata



Pelatihan Inovasi
dan Kreasi Kriya
Tingkat Lanjutan





Kegiatan
Pelatihan Inovasi
Produk Kreatif
bagi Pelaku Usaha
Souvenir Desa



Dokumentasi
Tugas
Pembantuan
Satker Disbudpar
Prov, Sulawesi
Tenggara





Workshop
Pemahaman
Indikator dan
Pengisian Data
Kepariwisatahan dan
Ekonomi Kreatif





Pelatihan Bagi
Pelatih
Kepemanduan
Wisata Berbasis
Kompetensi
Sulawesi Tenggara



Workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sulawesi Tenggara



Bimbingan Teknis Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Data





Bimbingan Teknis
Penyusunan Proposal
& Presentasi Bisnis
Ekonomi Kreatif

